

**Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan  
Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Akshel Moza Rahmadhama Raharjo  
Nomor Mahasiswa : 20313124  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2024**

Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah  
Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1  
Program Studi Ekonomi Pembangunan  
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Akshel Moza Rahmadhama Raharjo  
Nomor Mahasiswa : 20313124  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2024**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah disusun dengan penuh kesungguhan dan tidak mengandung unsur plagiasi sebagaimana yang dijelaskan dalam pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Jika di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Penulis,



Akshel Moza Rahmadhama Raharjo

## **PENGESAHAN**

Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah  
Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023

Nama : Akshel Moza Rahmadhama Raharjo  
Nomor Mahasiswa : 20313124  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 15 Agustus 2024  
Telah disetujui dan di sahkan oleh  
Dosen Pembimbing



Prof. Jaka Sriyana SE, M.Si., Ph.D

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, TINGKAT PENGANGGURAN DAN BELANJA PEMERINTAH  
TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2023**

Disusun oleh : AKSHEL MOZA RAHMADHAMA RAHARJO

Nomor Mahasiswa : 20313124

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Rabu, 04 September 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Dr. Sahabudin Sidiq, M. A.

  
.....  
  
.....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia  
  
Prof. Sahabudin Sidiq, S.E., M.Si., Ph.D.



## MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa pahan *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagaimana *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, saya berterima kasih atas segala rahmat dan petunjuk-Nya. Berkat segala berkah dan kemudahan yang diberikan, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Saya dedikasikan skripsi ini kepada Ayah dan mendiang Ibu saya sebagai simbol perjuangan saya dalam meraih cita-cita yang mulia. Saya sangat berterima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan selama masa kuliah, yang telah mempermudah dan melancarkan perjalanan akademis saya hingga saat ini.

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar, orang terkasih, dan teman-teman dekat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya, baik dalam suka maupun duka.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT, penulis mengucapkan syukur atas segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju peradaban yang lebih baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini berjudul “**Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023**”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan doa dan dukungan dari awal hingga selesai. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Budiyono dan Alm. Ibu Nurul Chasanah, serta abah saya Bapak Solimin, yang selalu memberikan dukungan dan doa tanpa henti untuk kemudahan dan kelancaran dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini, serta dengan setia mendengarkan setiap keluh kesah penulis dan memberikan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi.
2. Prof. Jaka Sriyana SE, M.Si., Ph.D. Sebagai dosen pembimbing skripsi, saya telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. Sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., M.A., Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D., Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung proses pendidikan dan penelitian di fakultas ini.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang dengan sabar telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, khususnya Ibu Mustika Noor Mifrahi SEI., MEK., Bapak Aminuddin Anwar S.E., M.Sc., dan Ibu Riska Dwi Astuti, S.Pd., M.Sc.
5. Keluarga kedua saya di Yogyakarta Era Kurniawati dan Ferizka Azalea Munaf serta orang terkasih Rian Adi Sapurta. Teman-teman seperjuangan saya M. Ragil Santoso, Amelia Rahmita, Sherly Natasya, Alifya Salsabila Ishmah, Yunike Saputri, Berlianti Niken, Windy Lonia, Nissa Rayapura, Nabila Putri Zahran, Dwi Fanny Agiela Kurniawati, Frendy Andika, Jovanka Adam Wildan dan Maritza Amalia Puteri Hadi. Teman-teman KKN Unit 62 khususnya Waleed Al-Shehari, Nabila Putri Zahran, Daniswara Alif, Nurfaizi Azmi, Adrian Putra Hidayat, dan Akmal Nuh. Teman ambis Muhammad Ragil Santoso, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan karya di masa mendatang. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Penulis,



Akshel Moza Rahmadhama Raharjo

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
BAB 1 LATAR BELAKANG .....	1
1.1    Pendahuluan .....	1
1.2    Perumusan Masalah.....	11
1.3    Tujuan Penelitian.....	11
1.4    Manfaat Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1    Kajian Pustaka.....	13
2.1    Landasan Teori .....	16
2.3    Hipotesis Penelitian .....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1    Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	25
3.2    Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	26
3.3    Metode Analisis Data .....	29
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	36
4.1    Deskripsi Data.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	56
5.1    Kesimpulan.....	56
5.2    Implikasi.....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Yogyakarta.	4
Tabel 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia.....	7
<b>Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>13</b>
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	37
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Regresi Fixed Effect Model.....	39
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Regresi Random Effect Model .....	40
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Common Effect Model.....	41
Tabel 4. 5 Hasil Chow Test .....	42
Tabel 4. 6 Hasil Hausman Test.....	43
Tabel 4. 7 Hasil Lagrange Multiplier (LM) Test .....	44
Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Uji Hipotesis.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	5
Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran .....	8
Gambar 1. 3 Belanja Total Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023.....	10
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	23

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I. Data Penelitian.....	63
Lampiran II. Uji Common Effect Model.....	65
Lampiran III. Uji Fixed Effect Model.....	66
Lampiran IV. Uji Random Effect Model .....	67
Lampiran V. Uji Chow .....	68
Lampiran VI. Uji LM Test.....	69
Lampiran VII. Uji Hausman Test .....	70

## ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi dampak PDRB, IPM, tingkat pengangguran, dan belanja pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2012-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan, sedangkan variabel independennya PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data panel (*pooled data*) dengan regresi *Random Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023, variabel IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023, variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023, dan variabel belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023. Sedangkan berdasarkan uji F, variabel PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023.

Kata Kunci: PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah, dan Kemiskinan

## **BAB 1**

### **LATAR BELAKANG**

#### **1.1 Pendahuluan**

Pembangunan berfungsi sebagai sarana atau proses untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan suatu negara mencerminkan kemajuan negara tersebut. Salah satu tanda keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, yang diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan (Rustam, 2010). Selain mengukur pertumbuhan ekonomi, evaluasi kinerja pembangunan ekonomi juga melibatkan efektivitas Pemanfaatan sumber daya yang ada harus dioptimalkan (Yacoub, 2012).

Kemiskinan di negara-negara berkembang tetap menjadi tantangan yang sulit, meskipun beberapa negara telah berhasil meningkatkan output produksi mereka dan pendapatan nasional mereka melalui upaya pembangunan (Sartika et al., 2016). Tingkat kemiskinan di suatu negara atau wilayah mencerminkan kesejahteraan penduduknya (Christianto, 2013). Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi.

Masalah kemiskinan menjadi fokus utama bagi semua negara di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk merupakan tujuan akhir yang dikejar oleh setiap negara. Meskipun berbagai ide dan konsep telah dipertimbangkan dan diadopsi di berbagai belahan dunia, namun hasilnya belum memuaskan. Indonesia, meskipun sudah 57 tahun merdeka dan berkembang, masih menghadapi tantangan kemiskinan. Sekitar 14% dari total populasi yang mencapai sekitar 240 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan kurang dari \$1 per hari. Dengan kata lain, masih terdapat sekitar 30 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Bahkan, ketika menggunakan standar penghasilan kurang dari \$2 per hari yang diusulkan oleh Bank Dunia, angka kemiskinan tersebut melonjak menjadi 35%. (Bank Dunia, 2015).

Walaupun Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam lima tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, namun hal ini belum berhasil secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga ternyata tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat mengatasi kemiskinan secara menyeluruh atau menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Selain itu, disparitas antara golongan kaya dan golongan miskin juga belum teratasi sepenuhnya.

Di Indonesia, masalah kemiskinan menjadi sangat krusial, bukan hanya karena cenderung meningkat, tetapi juga dampaknya yang meluas tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga dalam ranah sosial dan stabilitas politik domestik. Oleh sebab itu, mengentaskan kemiskinan perlu menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan ekonomi, baik untuk jangka waktu singkat maupun jangka waktu panjang.

Menurut (Suparlan, 2000), kemiskinan merupakan kondisi di mana individu atau kelompok kekurangan harta dan aset berharga. Mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan atau minim modal, baik dalam bentuk uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses ke fasilitas pelayanan umum, peluang usaha, dan pekerjaan. Selain itu, kemiskinan menggambarkan situasi di mana individu atau kelompok kekurangan kapasitas, kebebasan, sumber daya, dan akses untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa mendatang (Pandji Indra, 2001). Mereka juga sangat rentan terhadap risiko dan tekanan akibat penyakit serta kenaikan mendadak biaya pangan dan pengeluaran untuk pendidikan (UNCHS, 1996).

Konsep jeratan kemiskinan, atau yang dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan, mengacu pada serangkaian faktor yang saling berinteraksi sehingga menciptakan kondisi di mana suatu negara cenderung tetap miskin dan tantangan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih maju. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Nurkse, seorang ekonom yang mengkaji isu-isu terkait proses akumulasi kapital di negara-negara berkembang.

Berdasarkan laporan Menurut (Bank Dunia, 2002), karakteristik penduduk miskin dapat dikategorikan berdasarkan komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Dalam konteks kelompok masyarakat, sarana prasarana menjadi faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kualitas infrastruktur sangat berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik memfasilitasi aktivitas ekonomi dan sosial serta menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Indikator penting dalam pembangunan infrastruktur meliputi sistem pengairan, penyediaan listrik, dan keadaan jalan utama untuk transportasi. Selain itu, akses yang setara terhadap usaha atau pekerjaan, seperti adanya lembaga keuangan dan industri, juga merupakan indikator penting dari karakteristik komunitas.

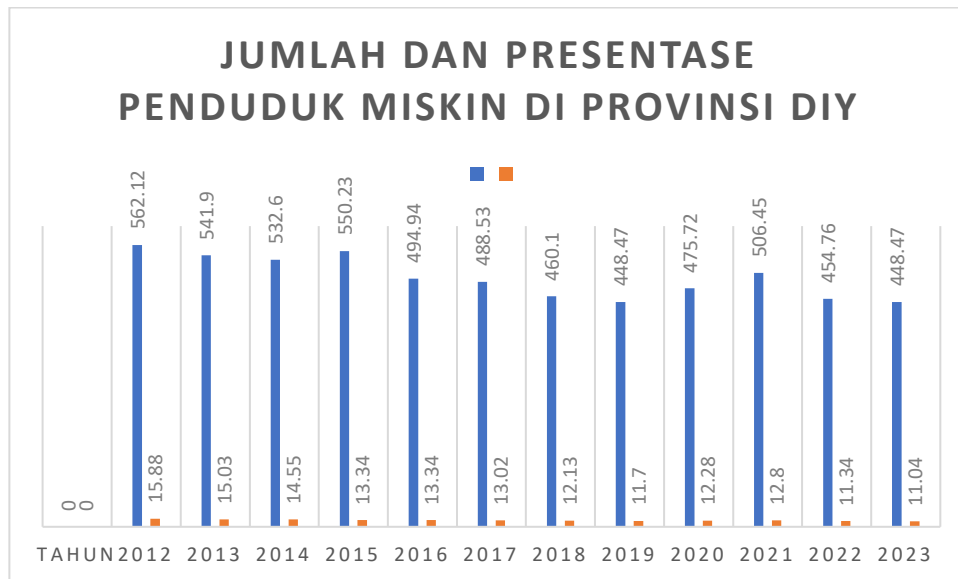
Menurut (Jhingan, 2000), kemiskinan merupakan kekurangan dalam memperoleh barang dan layanan yang diperlukan untuk mencapai tingkat hidup yang memadai. Kemiskinan sering kali berhubungan dengan pengangguran, dan keduanya berdampak pada kualitas Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat kualifikasi pendidikan yang rendah dapat membatasi akses seseorang ke pekerjaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, penting untuk meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup indikator seperti tingkat pendidikan, kesehatan (diukur dari Angka Harapan Hidup), dan tingkat melek huruf. Penanganan kemiskinan sangat penting karena jika dibiarkan, dapat berdampak negatif pada kualitas hidup dan kesehatan manusia (Groce, 2011).

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Yogyakarta**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2012	562,12	15,88
2013	541,90	15,03
2014	532,60	14,55
2015	550,23	13,34
2016	494,94	13,34
2017	488,53	13,02
2018	460,10	12,13
2019	448,47	11,70
2020	475,72	12,28
2021	506,45	12,80
2022	454,76	11,34
2023	448,47	11,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Yogyakarta 2012-2023

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah penduduk miskin di Yogyakarta mencapai puncaknya pada tahun 2012. Namun, pada tahun 2014, jumlah tersebut menurun drastis dari 562,12 ribu menjadi 532,60 ribu. Meski demikian, pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin kembali meningkat sedikit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah kemiskinan di Yogyakarta bersifat fluktuatif, dengan naik turun dari tahun ke tahun.



Sumber : Badan Pusat Statistik Yogyakarta 2012-2023

**Gambar 1. I**

### **Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Yogyakarta**

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran keberhasilan pembangunan dan merupakan prasyarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan terletak pada efektivitasnya dalam memperluas pendapatan, termasuk bagi penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus merata dan memberikan dampak langsung pada pendapatan masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan. Ini berarti bahwa pertumbuhan harus terjadi di sektor-sektor yang menjadi sumber penghidupan utama bagi penduduk miskin, seperti sektor pertanian atau sektor dengan tingkat padat karya tinggi. Selain itu, pemerintah juga harus efektif dalam mendistribusikan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang mungkin diperoleh dari sektor-sektor yang lebih maju seperti jasa yang memerlukan investasi modal yang besar (Siregar, 2008).

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diamati melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. PDRB mencerminkan tingkat

pembangunan setiap daerah. Selama periode 2012-2023, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan PDRB yang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2012, PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 77.247.860,60 juta rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai 129.818.357,90 juta rupiah. Meskipun PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, namun kenyataannya hal ini belum berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran penting dengan tiga parameter utama: kesehatan, pendidikan, dan pemasukan. Peningkatan tingkat pendidikan seseorang sering kali dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah. Jika kompensasi mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi atau pelatihan yang memadai, semakin tinggi pula produktivitas mereka, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain pendidikan, kesehatan juga memainkan peran penting dalam peningkatan pendapatan. Meningkatkan kondisi kesehatan penduduk dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam angkatan kerja. Peningkatan kesehatan juga dapat berdampak positif pada tingkat pendidikan dan pengembangan potensi individu, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).

**Tabel 1. 2**  
**Indeks Pembangunan Manusia**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DIY (%)
2012	76,15
2013	76,44
2014	76,81
2015	77,59
2016	78,38
2017	78,89
2018	79,53
2019	79,99
2020	79,97
2021	80,22
2022	80,64
2023	81,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Yogyakarta 2012-2023

Tabel 1.2 juga menyoroti peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Data menunjukkan bahwa IPM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 76,15%, sedangkan pada tahun 2023, angkanya meningkat menjadi 81,09%. Hal ini menunjukkan upaya maksimal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan di wilayah tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Yogyakarta 2012-2023

**Gambar 1. II**

**Tingkat Pengangguran (%)**

Pada Gambar 1.2, terlihat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2016 dengan angka 5,61%, Sementara itu, tingkat pengangguran terendah tercatat pada tahun 2017. Tingkat pengangguran pada tahun 2015 dipengaruhi oleh dampak krisis global yang juga berdampak signifikan pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada bulan Agustus 2015, keadaan perekonomian dunia dan Indonesia, serta situasi pasar kerja dan dunia usaha, tercermin dengan jelas dalam kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana terlihat dari hasil survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan pada bulan tersebut. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sebelumnya mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya, mencapai 3,02%. Namun, pada tahun 2015, jumlah ini kembali naik menjadi 4,07%. Hal ini menandakan adanya perkembangan positif dalam investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tersedianya lapangan kerja baru.

Pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur kegiatan ekonomi dengan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pemerintah. Menurut (Yulianita, 2009S), pengeluaran pemerintah memiliki peran krusial dalam penyediaan barang dan jasa publik. Ketersediaan barang dan jasa publik ini akan mempengaruhi akumulasi modal atau investasi dari masyarakat atau sektor swasta, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal atau investasi tersebut akan meningkatkan pertumbuhan sektor produksi, yang pada gilirannya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai, pembelian barang, perjalanan dinas, pemeliharaan, belanja tak terduga, serta pembayaran bunga dan cicilan hutang. Sementara itu, pengeluaran pembangunan meliputi pembiayaan dan dukungan untuk berbagai proyek pembangunan.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2012-2023

**Gambar 1. III**

**Belanja Total Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  
2012-2023**

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, terlihat bahwa belanja pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, TINGKAT PENGANGGURAN, DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2023".

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari konteks di atas, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada harga konstan tahun dasar 2012 terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana dampak Belanja Pemerintah terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan variabel independen baik secara individual maupun secara simultan:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis seberapa besar dampak IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis seberapa signifikan dampak Belanja Pemerintah terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi atau mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam perpustakaan untuk perbandingan objek penelitian yang serupa, khususnya mengenai Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga untuk lebih memperhatikan masalah kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagi penulis atau peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari penyelesaian tugas akhir yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Pustaka

Penulisan skripsi ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk membandingkan kelebihan dan kekurangannya, serta sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka pemikiran atau arah penelitian. Penulis juga memanfaatkan referensi dari skripsi dan buku-buku untuk memperoleh informasi dan dasar teoritis yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Lokasi	Metode	Hasil
1	Kurnia Dwi Rahmawati (2017)	Daerah Istimewa Yogyakarta	Data Time Series	Jumlah populasi memiliki dampak negatif yang signifikan pada kemiskinan, sementara pengangguran memiliki dampak yang positif.
2	Dewi Kurniawati Sunusi, Anderson Kumenaung, Debby Rotinsulu (2014)	Sumatra Utara	Kuantitatif	Pengeluaran Pemerintah memiliki dampak langsung terhadap kemiskinan.
3	Irma Setiawati (2017)	Kabupaten Pinrang	Kuantitatif	PDRB memiliki dampak yang positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
4	Ravi Dwi Wijayanto (2010)	Jawa Tengah	Data Panel	PDRB memiliki dampak negatif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan.
5	Nurul Fadlillah,	Jawa Tengah	Deskriptif, survey	Secara individu,

	Sukiman dan Agustin Susyatna Dewi (2016)			IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
--	---	--	--	---

Kajian Pustaka merupakan gambaran dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian baru. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kerangka pemikiran yang komprehensif dan memperkaya isi penelitian dengan menggabungkan temuan dari penelitian sebelumnya serta melakukan perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyajikan penelitian baru dengan keaslian dan inovasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia, 2017) memiliki fokus pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan menggunakan metode Data Time Series. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah populasi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Di sisi lain, pengangguran memiliki dampak yang positif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam jumlah populasi dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, Anderson, dan Debby, 2014) ifokuskan pada daerah Sumatra Utara. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak langsung terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah, seperti program-program sosial atau pembangunan infrastruktur, memiliki potensi untuk secara signifikan memengaruhi kemiskinan di Sumatra Utara. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kebijakan pengeluaran pemerintah dan kemiskinan, khususnya dalam konteks Sumatra Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Irma, 2017) di Kabupaten Pinrang merupakan sebuah penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki dampak yang positif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut. Namun, dampak tersebut tidak tergolong signifikan

secara statistik. Hal ini menandakan bahwa meskipun adanya korelasi positif antara PDRB dan kemiskinan, namun hubungan ini tidak cukup kuat secara statistik untuk dianggap sebagai dampak yang signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Pinrang, meskipun hasilnya tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara PDRB dan tingkat kemiskinan. Kemudian, Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanto, 2010) di Jawa Tengah menggunakan metode Data Panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, dampak ini tidak tergolong signifikan secara statistik. Artinya, meskipun terdapat hubungan negatif antara PDRB dan kemiskinan, namun hubungan ini tidak cukup kuat secara statistik untuk dianggap sebagai dampak yang signifikan. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang hubungan ekonomi regional dan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, meskipun hasilnya tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara PDRB dan tingkat kemiskinan. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh (Fadlillah, Sukiman, dan Dewi, 2016) di Jawa Tengah menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode survei. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara individu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Artinya, peningkatan IPM dapat berkontribusi secara positif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah, khususnya peran IPM dalam konteks tersebut.

## **2.1 Landasan Teori**

### **2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai dari semua barang dan jasa akhir atau nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Terdapat tiga metode untuk menghitung total produksi ekonomi suatu negara dalam satu tahun. Metode pengeluaran menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan total pengeluaran untuk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Ini mencakup pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta pendapatan dari ekspor, dikurangi dengan pengeluaran untuk barang impor. Metode produksi atau produk netto menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu negara, dengan hanya memperhitungkan nilai tambah atau value added yang dihasilkan. Metode pendapatan menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang berkontribusi dalam pencapaian pendapatan nasional (Sukirno, 1994).

Manfaat dari penghitungan nilai PDRB adalah:

1. Memahami dan menganalisis struktur ekonomi suatu wilayah. Dengan menghitung PDRB, dapat diidentifikasi apakah suatu wilayah memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri, pertanian, atau jasa, serta seberapa besar kontribusi masing-masing sektor tersebut.
2. Membandingkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Karena PDRB dicatat setiap tahun, tersedia data angka tahunan. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apakah terjadi peningkatan atau penurunan dalam kemakmuran materiil atau tidak.

## **Dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tingkat Kemiskinan**

Menurut (Sadono Sukirno, 2000), pertumbuhan ekonomi diukur dari peningkatan PDRB tanpa memandang besar kecilnya peningkatan tersebut. Selain itu, pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Penurunan PDRB di suatu wilayah dapat berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dengan pendapatan yang terbatas, banyak rumah tangga miskin harus menyesuaikan pola makan mereka dengan memilih barang yang lebih murah dan dalam jumlah yang lebih sedikit.

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran untuk mengevaluasi kesuksesan pembangunan dan merupakan syarat yang mutlak untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, kecukupan pertumbuhan tersebut tergantung pada efektivitasnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi harus secara merata membantu setiap kelompok pendapatan, termasuk kelompok penduduk miskin (Siregar dan Wahyuniarti, 2007)

### **2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat penting untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IPM mengukur akses penduduk terhadap hasil pembangunan melalui pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya. IPM terdiri dari tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur menggunakan indikator Umur Harapan Hidup (UHH), sementara dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Adapun standar hidup layak diukur berdasarkan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan.

## **Pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Tingkat Kemiskinan**

Teori pertumbuhan baru menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas modal manusia serta mendorong penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas manusia. Dalam kenyataannya, investasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berarti pengetahuan dan keterampilan juga meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas kerja. Perusahaan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan menggunakan tenaga kerja yang produktif, sehingga mereka juga siap memberikan gaji yang lebih tinggi. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan tenaga kerja meningkatkan hasil pertanian karena tenaga kerja yang terampil bekerja lebih efisien. Akhirnya, individu yang produktif mencapai kesejahteraan yang lebih baik, terlihat dari peningkatan pendapatan dan konsumsi. Rendahnya produktivitas di kalangan miskin disebabkan oleh akses yang terbatas terhadap pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

### **2.1.3 Tingkat Pengangguran**

Menurut definisi internasional yang standar, pengangguran adalah individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan aktif mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. (Sadono Sukirno, 2000) menyatakan bahwa pengangguran umumnya dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan penyebabnya:

1. Pengangguran friksional terjadi ketika individu memilih untuk keluar dari pekerjaan mereka dengan tujuan mencari peluang pekerjaan yang lebih baik atau sesuai dengan preferensi mereka.
2. Pengangguran struktural terjadi akibat perubahan dalam struktur perekonomian yang dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dan permintaan pasar tenaga kerja.

3. Pengangguran konjungtur muncul karena terdapat kelebihan pengangguran yang bersifat alamiah dan dipicu oleh penurunan permintaan total dalam perekonomian.

Pengangguran merupakan fenomena yang umum terjadi dalam sebuah perekonomian karena beberapa faktor. Pertama, proses pencarian kerja membutuhkan waktu untuk menyesuaikan antara pekerja dan posisi pekerjaan yang tersedia. Kedua, adanya kekakuan upah juga menjadi faktor penyebab. Kekakuan ini mungkin disebabkan oleh kebijakan upah minimum, negosiasi kolektif antara serikat pekerja, dan praktik pengupahan yang tidak fleksibel (Mankiw, 2000).

### **Dampak Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan**

(Lincoln, 1997) mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat kemiskinan. Bagi sebagian besar individu, khususnya yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu, mereka cenderung termasuk dalam kelompok masyarakat yang sangat miskin. Di sisi lain, individu yang memiliki pekerjaan dengan gaji tetap, baik di sektor pemerintah maupun swasta, sering kali termasuk dalam kelompok kelas menengah ke atas. Pandangan ini menekankan bahwa setiap orang yang tidak memiliki pekerjaan dianggap miskin, sementara mereka yang memiliki pekerjaan penuh dianggap kaya. Namun, ada juga individu di perkotaan yang mungkin tidak bekerja secara sukarela karena mereka mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikan mereka atau lebih baik secara ekonomi. Mereka mungkin menolak pekerjaan yang dianggap rendah karena memiliki sumber pendapatan lain yang dapat membantu secara finansial. Orang-orang semacam ini mungkin dianggap menganggur, namun belum tentu miskin. Sebaliknya, ada juga individu yang bekerja penuh waktu namun tetap mengalami kesulitan finansial. Banyak pekerja di sektor informal yang bekerja penuh waktu namun masih hidup dalam kondisi kemiskinan.

#### **2.1.4 Belanja Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah meliputi berbagai produk dan keputusan yang dibuat untuk menyediakan barang dan layanan publik bagi masyarakat. Total belanja pemerintah merupakan hasil dari semua keputusan anggaran di berbagai tingkatan pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun daerah. Pengeluaran pemerintah daerah tercermin dalam belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut (Bastian, 2006), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk anggaran, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi belanja pemerintah yang tepat sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Dengan peningkatan kesejahteraan, upaya pengurangan kemiskinan di suatu wilayah dapat berhasil, karena salah satu tujuan utama pengeluaran pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari seberapa besar alokasi anggaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan di suatu daerah. Menurut (Bastian, 2006), tujuan utama dari APBD dan kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan publik dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan.

### **2.1.5 Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki berbagai definisi dan konsep, yang mencerminkan kompleksitas masalah ini dari berbagai perspektif. Secara umum, kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2018), kemiskinan merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, sehingga menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan yang diamanatkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang telah dijalankan selalu menekankan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan, karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, banyak rumah tangga berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP 1,55 dolar AS per hari. Oleh karena itu, meskipun tidak dikategorikan sebagai miskin, banyak penduduk tetap berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada pendapatan tidak sepenuhnya mencerminkan batas kemiskinan yang sesungguhnya. Banyak orang yang mungkin tidak dianggap “miskin secara pendapatan” dapat dikategorikan sebagai miskin karena kurangnya akses ke layanan dasar dan rendahnya indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan beragam, perbedaan antar daerah menjadi karakteristik utama dari kemiskinan di negara ini.

## **Faktor Penyebab Kemiskinan**

Menurut (Suharto, 2009), secara konseptual, kemiskinan dapat disebabkan oleh empat faktor utama:

1. Faktor individual: Meliputi aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis dari individu yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan individu tersebut dalam menghadapi kehidupannya.
2. Faktor sosial: Meliputi kondisi lingkungan sosial yang mempersempit ruang gerak individu dan menjebak mereka dalam kemiskinan. Contohnya adalah diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, atau etnis yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kemiskinan. Juga termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang memicu kemiskinan antargenerasi.
3. Faktor kultural: Menyebabkan kemiskinan melalui kondisi atau kualitas budaya tertentu. Faktor ini sering kali terkait dengan konsep "kemiskinan kultural" atau "budaya kemiskinan", yang mengaitkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas tertentu.
4. . Faktor struktural: Merujuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif, dan tidak terjangkau sehingga menyebabkan individu atau kelompok tertentu terjebak dalam kemiskinan.

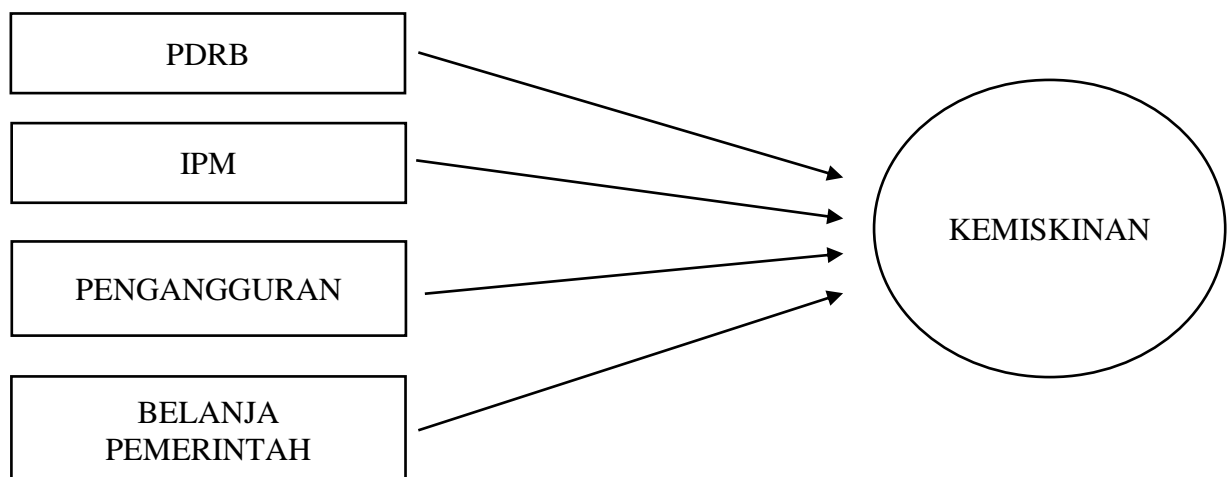
## **Jenis-jenis Kemiskinan**

(Nurhadi, 2007) mengklasifikasikan kemiskinan menjadi tiga jenis dengan variasi yang berbeda:

1. Kemiskinan Ekonomi: Secara ekonomis, kemiskinan dapat dijelaskan sebagai kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok individu. Sumber daya ini tidak terbatas hanya pada masalah keuangan, melainkan mencakup segala jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. Kemiskinan Sosial: Secara sosial, kemiskinan merujuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam maupun luar individu.
3. Kemiskinan Politik: Dalam konteks politik, kemiskinan terlihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini mencakup struktur politik yang menentukan kemampuan sekelompok individu untuk mengakses dan menggunakan sumber daya.

## 2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1

## 2.3 Hipotesis Penelitian

1. Diduga ada pengaruh bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku 2010 memiliki dampak negatif terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Diduga ada pengaruh bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki dampak negatif terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Diduga ada pengaruh bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Diduga ada pengaruh bahwa belanja pemerintah memiliki dampak yang negatif terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

#### **3.1.1 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder yang berupa panel, yang merupakan gabungan dari data time series dan cross section. Data sekunder merujuk pada data yang telah tercatat dan diamati sebelumnya oleh instansi terkait, publikasi jurnal, atau data dari penelitian lainnya yang sudah tersedia dalam bentuk yang sudah jadi. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2012 hingga 2023.

#### **3.1.2 Sumber Data**

Data ini menggunakan lima variabel, yaitu:

1. PDRB (X1): Merupakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku tahun 2012 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang tahun 2012-2023, diukur dalam miliar Rupiah. Data diperoleh dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. IPM (X2): Merupakan Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang tahun 2012-2023, diukur dalam persen. Data diambil dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pengangguran (X3), yang merupakan jumlah pengangguran menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang tahun 2012-2023, diukur dalam persen. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Belanja Pemerintah daerah (X4), yang merupakan jumlah belanja pemerintah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang tahun 2012-2023, diukur dalam miliar

Rupiah. Data ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Tingkat Kemiskinan (Y): Merupakan tingkat kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang tahun 2012-2023, diukur dalam ribu jiwa. Data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3.1.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mengadopsi metode teknik kepustakaan, di mana data yang digunakan adalah data sekunder. Proses pengumpulan data utama berfokus pada berbagai sumber dan instansi terkait dengan topik penelitian ini.

### **3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua kelompok variabel: variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang memiliki peran dalam menentukan atau memengaruhi variabel dependen, sementara variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini melibatkan satu variabel dependen dan tiga variabel independen.

Variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah akan diambil dari data sekunder. Kemiskinan akan menjadi variabel dependen, disimbolkan sebagai (K). Sedangkan variabel independen adalah variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, yaitu PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan belanja pemerintah.

### **3.2.1 Variable Dependen**

#### **Tingkat Kemiskinan**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan (TK). Tingkat Kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan konsumsi perkapita per bulan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita dalam satu hari, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Penyajian data dilakukan dalam satuan ribu jiwa.

### **3.2.2 Variabel Independen**

#### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Variabel independen yang pertama adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, yang diperhatikan adalah PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2012 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2023. Data ini diukur dalam satuan miliar Rupiah.

#### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Variabel independen berikutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS). IPM adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mencakup semua aspek pembangunan manusia, IPM mampu mencerminkan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, serta akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Data IPM yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia untuk periode tahun 2012-2023, diukur dalam satuan persen.

## **Belanja Pemerintah Daerah**

Variabel independen terakhir adalah Belanja Pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Belanja Pemerintah mengacu pada pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang yang tidak tahan lama, yang habis digunakan dalam proses produksi. Pengeluaran ini bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Data belanja pemerintah dalam penelitian ini diukur dalam miliar Rupiah. (Mikesell, 2013), dalam buku "Fiscal Administration," menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan kualitas layanan publik serta memperhatikan keberlanjutan fiskal. Mikesell menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

## **Tingkat Pengangguran**

Merujuk pada pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencakup individu yang telah memasuki angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) dan sedang aktif mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya terdaftar sebagai pekerja). Pada saat yang sama, mereka tidak sedang bekerja. Data yang digunakan untuk menganalisis tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk di Jawa Tengah untuk periode tahun 2012-2023, diukur dalam persentase.

### **3.3 Metode Analisis Data**

#### **3.3.1 Metode Analisi Data Panel**

Untuk menganalisis dampak PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran, dan Belanja Pemerintah, digunakan metode analisis kuantitatif dengan data panel. Data panel merupakan gabungan dari data time series dan cross section, di mana jumlah observasi diperoleh dari hasil perkalian observasi time series dan cross section. Penggunaan regresi data panel menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan penggunaan data time series atau cross section secara terpisah. Dengan menggabungkan informasi dari kedua sumber data tersebut, data panel memberikan jumlah data yang lebih banyak, sehingga meningkatkan derajat kebebasan. Selain itu, penggabungan ini juga dapat mengatasi masalah yang muncul ketika terjadi kehilangan variabel dalam analisis (Widarjono, 2009). Disamping itu, Penggunaan logaritma (LOG) dalam pengolahan data variabel PDRB dan belanja pemerintah daerah dilakukan untuk mengatasi beberapa masalah teknis dalam analisis data. Pertama, logaritma membantu mengurangi skala besar data yang sering kali memiliki nilai sangat tinggi, sehingga memudahkan perbandingan dengan variabel lain tanpa mengubah sifat relatifnya. Kedua, transformasi ini dapat meningkatkan normalitas distribusi data yang cenderung condong, sehingga lebih sesuai dengan asumsi statistik seperti regresi linear. Selain itu, logaritma juga mengurangi heteroskedastisitas yang sering mempengaruhi akurasi model, serta membantu dalam menginterpretasikan hubungan antar variabel dalam bentuk persentase perubahan yang lebih bermakna dalam konteks ekonomi. Terakhir, logaritma dapat mengurangi multikolinearitas antara variabel yang berkorelasi tinggi, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih stabil dan dapat diandalkan.

Dalam studi yang meneliti pengaruh variabel independen (PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran, dan Jumlah Penduduk) terhadap variabel dependen (Kemiskinan) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti menerapkan metode analisis data panel. Eviews 12 dipilih sebagai alat analisis untuk penelitian ini. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PENG_{it} + \beta_4 PEM_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

TK = Tingkat Kemiskinan (jiwa)

t = Tahun yang diteliti (2012-2023)

i = Kabupaten

$\beta_0$  = Intercept (Konstanta)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi masing-masing variabel

PDRB = PDRB (milyar rupiah)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (persen)

PENG = Tingkat Pengangguran (persen)

PEM = Belanja Pemerintah (milyar rupiah)

e = Error

### **3.3.2 Pemilihan Metode Estimasi Data Panel**

#### **3.3.2.1 Common Effect Model (CEM)**

Model Common Effect adalah model paling dasar dalam estimasi regresi data panel, yang mengkombinasikan data dari time series dan cross section, dan kemudian menggunakan estimasi *Ordinary Least Square* (OLS). Dalam metode ini, data

digabungkan tanpa memperhatikan perbedaan antara waktu dan individu. Berikut adalah model persamaannya:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_{PDR}B_{it} + \beta_{IP}M_{it} + \beta_{PEN}G_{it} + \beta_{PE}M_{it} + e_{it}$$

### 3.3.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa nilai observasi dan koefisien regresi (slope) tetap konstan dari waktu ke waktu. Dalam model efek tetap, asumsi ini menunjukkan bahwa slope tetap konstan tetapi intersep bervariasi antara unit, atau slope tetap konstan tetapi intersep bervariasi antara individu atau unit serta periode waktu. Estimasi model efek tetap dapat dilakukan dengan menggunakan variabel dummy yang sesuai dengan definisi dan kriteria dari masing-masing asumsi. Model estimasi ini sering disebut dengan *Least Squares Dummy Variables (LSDV)*. Berikut adalah persamaan modelnya:

$$TK_{it} = \beta_0i + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + e_{it}$$

dimana:  $i$  = banyaknya observasi(1,2,...n)

$t$  = banyaknya waktu(1,2,...t)

$n$  = banyaknya variabel bebas

$n \times t$  = banyaknya data panel

$e$  = residual

Pendekatan Fixed Effect memiliki risiko ketidakcocokan model dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, Diperlukan model yang mampu menggambarkan

variasi intersep yang mengasumsikan adanya perbedaan baik antar objek maupun antar waktu (Sriyana, 2014).

### 3.3.2.3 Random Effect Model (REM)

Pendekatan ini merujuk pada pemilihan estimasi data panel di mana residualnya memiliki potensi korelasi antara waktu dan individu, dengan asumsi bahwa setiap intersep berbeda tetapi mengikuti distribusi random. Persamaan untuk model Random Effect adalah sebagai berikut:

$$TK_{it} = \beta_0i + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + e_{it}$$

dimana: m = banyaknya observasi (1,2,...m)

t = banyaknya waktu (1,2,...t)

n = banyaknya variabel bebas

n x t = banyaknya data panel

e = residual

### 3.3.3 Uji Pemilihan Model

#### 3.3.3.1 Uji Chow

Uji Chow dapat digunakan untuk menguji pemilihan antara model *common effect* atau *fixed effect* dalam analisis. Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

Ho : Common Effect Model

Ha : Fixed Effect Mode

Dengan asumsi sebagai berikut:

1. Ho diterima jika, probabilitas  $> \alpha$  (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Common Effect Model*.
2. Ha diterima jika, probabilitas  $< \alpha$  (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

### 3.3.3.2 Uji Hausman

Untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *random effect* atau *fixed effect*, uji Hausman dapat digunakan. Hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

Ho : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Dengan asumsi sebagai berikut:

1. Ho diterima jika, probabilitas  $> \alpha$  (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Random Effect Model*.
2. Ha diterima jika, probabilitas  $< \alpha$  (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

### 3.3.4 Uji Statistik

Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan meliputi Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t), Uji Koefisien Regresi secara simultan (Uji F), dan Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>).

#### 3.3.4.1 Uji t

Koefisien regresi parsial, yang juga dikenal sebagai uji t, digunakan untuk mengevaluasi pengaruh setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan taraf signifikansinya. Hipotesis secara individu adalah sebagai berikut:

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto

H<sub>0</sub>:  $\beta_1 \geq 0$ , artinya variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak memengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H<sub>1</sub>:  $\beta_1 < 0$ , maka terdapat variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia

H<sub>0</sub>:  $\beta_2 \geq 0$ , artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota tidak memengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H<sub>1</sub>:  $\beta_2 < 0$ , maka terdapat variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

3. Variabel Tingkat Pengangguran

H<sub>0</sub>:  $\beta_3 \geq 0$ , artinya variabel Tingkat Pengangguran tidak memengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H<sub>1</sub>:  $\beta_3 < 0$ , maka terdapat variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

4. Variabel Belanja Pemerintah

H<sub>0</sub>:  $\beta_4 \geq 0$ , artinya variabel Belanja Pemerintah tidak memengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H1:  $\beta_4 < 0$ , maka terdapat variabel Belanja Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

#### **3.3.4.2 Uji F**

Uji F digunakan untuk menentukan apakah keseluruhan variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Uji F juga dikenal sebagai uji kelayakan model, yang membantu mengidentifikasi apakah model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Kelayakan di sini mengacu pada kemampuan model yang diestimasi untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis uji F adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$$

Jika  $F_{hitung} > F_{kritis}$  maka menolak  $H_0$ , artinya variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen. Jika  $F_{hitung} < F_{kritis}$  maka menerima  $H_0$  yang artinya secara bersama – sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

#### **3.3.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Nilai  $R^2$  yang rendah atau mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas atau kecil. Sebaliknya, nilai  $R^2$  yang tinggi mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar atau hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dalam variabel terikat.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup informasi tentang kemiskinan, PDRB, IPM, tingkat pengangguran, dan belanja pemerintah, yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup periode enam tahun, dari tahun 2012 hingga 2023, dan meliputi data cross section dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemiskinan, sementara variabel bebasnya adalah PDRB, IPM, pengangguran, dan belanja pemerintah.

#### **Hasil Pengolahan Data**

Statistika deskriptif adalah analisis statistik yang memanfaatkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian. Mean diperoleh dengan membagi total nilai data dengan jumlah data yang ada. Standar deviasi dihitung sebagai akar dari jumlah kuadrat selisih antara setiap nilai data dengan mean. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dalam data yang diteliti, sedangkan nilai minimum adalah nilai terendah. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 1**  
**Statistik Deskriptif Variable Penelitian**

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	99.39967	9.735429	77.80400	3.809667	27.13132
Median	99.35000	9.779856	79.06000	3.600000	26.92829
Maximum	160.1500	10.58428	88.61000	9.160000	34.14127
Minimum	29.45000	8.700234	65.69000	1.380000	21.40981
Std. Dev.	41.65504	0.534012	6.515046	1.746404	2.342724
Observation	60	60	60	60	60

Sumber: Lampiran I. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif yang disajikan dalam tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat 60 observasi untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2012-2023. Rata-rata Kemiskinan selama tahun 2012-2023 adalah 99.39967 (persen), dengan nilai tertinggi mencapai 160.1500 (persen) dan nilai terendah sebesar 29.45000 (persen). Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2012-2023 adalah 9.735429 (miliar rupiah), dengan nilai tertinggi mencapai 10.58428 (miliar rupiah) dan nilai terendah sebesar 8.700234 (miliar rupiah). Untuk variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata selama tahun 2012-2023 adalah 77.80400 (persen), dengan nilai tertinggi sebesar 88.61000 (persen) dan nilai terendah sebesar 65.69000 (persen).

Rata-rata Tingkat Pengangguran selama tahun 2012-2023 adalah 27.13132 (persen), dengan pengangguran tertinggi sebesar 9.160000 (persen) dan yang terendah sebesar 1.380000 (persen). Untuk Belanja Pemerintah selama periode yang sama, rata-ratanya adalah 27.13132 (miliar rupiah), dengan nilai maksimum 34.14127 (miliar rupiah) dan nilai minimum 21.40981 (miliar rupiah).

Penentuan teknik pengambilan data bergantung pada asumsi yang diadopsi oleh penulis dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data statistik yang benar, sehingga hasilnya bisa dibenarkan secara statistik. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memilih model yang paling sesuai dari tiga model yang tersedia. Data panel yang telah dikumpulkan kemudian disubstitusi menerapkan teknik *fixed effect*, model *random effect*, dan model *common effect*, dengan temuan sebagai berikut:

#### 4.1.1. Regresi Model Fixed Effect

Model *Fixed Effect* adalah model di mana *intercept* berbeda-beda untuk setiap subjek (*cross section*), tetapi slope tetap konstan secara bertahap. Pendekatan ini menganggap bahwa intercept bervariasi di antara subjek, sementara slope tidak berubah di antara subjek. Pendekatan ini sering disebut sebagai Model *Least Square Dummy Variables* (LSDV). Hasil estimasi regresi dari *Model Fixed Effect* bisa diperiksa pada tabel berikut:

**Tabel 4. 2 Hasil Analisis Regresi *Fixed Effect Model***

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	422.8171	45.78810	9.234213	0.0000
LOG(X1)	7.392855	7.704298	0.959575	0.3418
X2	-4.926119	0.717229	-6.868265	0.0000
X3	2.068449	0.881020	2.347789	0.0228
LOG(X4)	-0.737095	0.332228	-2.218645	0.0310
R-squared		0.985357		
F-statistic		428.9903		
Prob (F-statistic)		0.000000		

Sumber: Olah Data Eviews 12

#### 4.1.2. Regresi Model Random Effect

Model *Random Effect* muncul karena variasi dalam nilai dan arah hubungan antara subjek dianggap sebagai faktor acak, yang diwakili dalam bentuk sisa. Model ini digunakan untuk estimasi pada data panel, di mana variabel sisa diasumsikan memiliki hubungan baik antar waktu maupun antar subjek. Model *Random Effect* dirancang untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada Model *Fixed Effect*. Dalam prosedur analisis data panel dengan Model *Random Effect*, harus dipastikan bahwa jumlah *cross section* lebih banyak daripada jumlah variabel penelitian. Hasil dari Model *Random Effect* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 3 Hasil Analisis Regresi *Random Effect Model***

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.95452	17.98458	2.277201	0.0267
LOG(X1)	46.35429	2.204498	21.02714	0.0000
X2	-4.175753	0.246912	-16.91189	0.0000
X3	-11.66120	0.713114	-16.35250	0.0000
LOG(X4)	-0.866830	0.303713	-2.854109	0.0061
R-squared		0.571380		
F-statistic		18.32967		
Prob (F-statistic)		0.000000		

Sumber: Olah Data Eviews 12

### 4.1.3. Regresi Model Common Effect

Model *Common Effect* merupakan jenis model regresi yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*, dengan metode OLS digunakan untuk mengestimasi model data panel. Di antara ketiga model yang ada, Model *Common Effect* adalah yang paling sederhana. Hasil dari regresi menggunakan Model *Common Effect* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 4 Hasil Analisis *Common Effect Model***

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.95452	93.69735	0.437094	0.6638
LOG(X1)	46.35429	11.48515	4.036020	0.0002
X2	-4.175753	1.286381	-3.246124	0.0020
X3	-11.66120	3.715231	-3.138754	0.0027
LOG(X4)	-0.866830	1.582305	-0.547827	0.5860
R-squared		0.571380		
F-statistic		18.32967		
Prob (F-statistic)		0.000000		

Sumber: Olah Data Eviews 12

## Pemilihan Model Regresi

Penentuan model terbaik di antara model *Random Effect*, *Fixed Effect*, dan *Common Effect* dilakukan melalui tiga teknik estimasi model. Ketiga teknik ini diterapkan dalam regresi data panel untuk menentukan model yang paling sesuai. Uji pertama adalah *Chow Test*, yang digunakan untuk memilih antara Model *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Uji kedua adalah *Hausman Test*, yang digunakan untuk memilih antara Model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Uji ketiga adalah *Lagrange Multiplier (LM) Test*, yang digunakan untuk memilih antara Model *Common Effect* dan *Random Effect*. Setiap uji ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

### 4.1.4. Chow Test

Setelah mendapatkan hasil dari Model *Common Effect* dan *Fixed Effect*, langkah berikutnya adalah melakukan uji *Chow*. *Chow Test* adalah prosedur untuk membandingkan Model *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Dalam pendekatan ini, jika nilai probabilitas lebih besar dari alpha (5%), maka model terbaik adalah *Common Effect*. Namun, jika nilai probabilitas kurang dari alpha (5%), maka model terbaik adalah *Fixed Effect*. Hasil *Chow Test* dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 5 Hasil *Chow Test***

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	360.462807	(4,51)	0.0000
Cross-section Chi-squared	202.597051	4	0.0000

Sumber: Olah Data Eviews 12

Tabel menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-squared* kedua-duanya kurang dari 0.05. Hal ini mengindikasikan penolakan  $H_0$ , yang berarti model yang dipilih adalah model efek tetap. Hasil uji ini menunjukkan bahwa model efek tetap lebih sesuai dibandingkan dengan model efek umum.

#### 4.1.5. Hausman Test

*Chow test* menunjukkan bahwa regresi yang lebih sesuai adalah model efek tetap. Selanjutnya, akan dilakukan *Hausman test* untuk membandingkan model efek acak dengan model efek tetap. Jika nilai probabilitas *Cross-section* random lebih besar dari 5%, maka model terbaik adalah efek acak. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 5%, model yang paling sesuai adalah efek tetap. Detail hasil *Hausman test* tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 6 Hasil *Hausman Test***

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	1441.851227	4	0.0000

Sumber: Olah Data Eviews 12

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk Cross-section random adalah 1352.55933, yang lebih besar dari nilai alpha (0.05). Oleh karena itu, tidak ada cukup bukti untuk menolak  $H_0$ . Ini mengindikasikan bahwa model yang dipilih adalah model efek acak yang lebih sesuai dibandingkan dengan model efek tetap.

#### 4.1.6 Lagrange Multiplier (LM) Test

Setelah mengonfirmasi melalui *Chow test* dan *Hausman test* bahwa model yang sesuai adalah model efek tetap dan model efek acak, dilakukan *Lagrange multiplier test* untuk memverifikasi hasil tersebut. *Lagrange multiplier test* digunakan untuk membandingkan model efek umum dengan *Model Efek* acak. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5%, *Model Efek* umum dianggap yang terbaik. Namun, jika nilai probabilitasnya kurang dari 5%, *Model Efek* acak dianggap yang lebih sesuai. Detail hasil dari *Lagrange multiplier test* tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4. 7 Hasil Lagrange Multiplier (LM) Test**

	Test Hypothesis Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	167.6466 (0.0000)	0.823605 (0.3641)	168.4702 (0.0000)

Sumber: Olah Data Eviews 12

Dalam penelitian ini, uji *Lagrange multiplier* menerapkan teknik *Breusch-Pagan*. Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai kemungkinan untuk kedua uji *Breusch-Pagan* adalah 0.0000, yang lebih rendah dari nilai alpha 0.05. Oleh karena itu, hipotesis nol ditolak, yang mengindikasikan bahwa model yang dipilih adalah *Model Efek* acak. Penemuan ini mengarah pada *Model Efek* acak lebih sesuai jika dibandingkan dengan *Model Efek* umum.

## Model Regresi Terbaik

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa model terbaik yang sesuai dengan data adalah *Fixed Effect Model*. Detail dari hasil regresi dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Uji Hipotesis**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	422.8171	45.78810	9.234213	0.0000
LOG(X1)	7.392855	7.704298	0.959575	0.3418
X2	-4.926119	0.717229	-6.868265	0.0000
X3	2.068449	0.881020	2.347789	0.0228
LOG(X4)	-0.737095	0.332228	-2.218645	0.0310
R-squared		0.985357		
F-statistic		428.9903		
Prob (F-statistic)		0.000000		

Sumber: Olah Data Eviews 12

#### 4.1.7 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai seberapa besar bagian dari variasi total dalam Y yang bisa dijelaskan oleh model regresi.. Dengan kata lain, uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variasi atau determinasi dari variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil uji ini menunjukkan nilai *R-Squared* sebesar 0.985357 atau 98.5357%. nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kemiskinan, PDRB, IPM, Tingkat Penangguran, Belanja Pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2023 sebesar 98.5357%, sedangkan sisanya yaitu 1.4643% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

#### 4.1.8 Uji simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengukur pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menentukan dampak variabel independen, yaitu kemiskinan, PDRB, IPM, Tingkat Penangguran, Belanja Pemerintah secara simultan terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia. Hasil pengujian menunjukkan Nilai F hitung sebesar 428.9903 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.000000 < 0.05$ , maka menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$ , artinya variabel kemiskinan, PDRB, IPM, Tingkat Penangguran, Belanja Pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2023.

#### 4.1.9 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengidentifikasi dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah.

1. Hasil uji t pada variable PDRB positif sebesar 7.392855 dengan probabilitas  $0.3418 > 0.05$  sehingga menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak signifikan, artinya variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap indeks Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2023.
2. Hasil uji t pada variabel IPM negatif sebesar -4.926119 dengan probabilitas  $0.0000 > 0.05$  sehingga menunjukkan bahwa variabel IPM signifikan, artinya variabel IPM berpengaruh terhadap indeks Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2023.
3. Hasil uji t pada variabel Tingkat Pengangguran didapatkan koefisien sebesar 2.068449 dengan probabilitas  $0.0228 < 0.05$  sehingga menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran signifikan, artinya variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap indeks Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2023.
4. Hasil uji t pada variabel Belanja Pemerintah didapatkan koefisien dari pengeluaran pemerintah negatif sebesar -0.737095 dengan probabilitas  $0.0310 < 0.05$  sehingga menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah signifikan, artinya variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2023.

#### 4.1.10 Interpretasi Hasil

$$Y = 422.8171 + 7.392855 \text{ LOG}(X1) - 4.926119 X2 + 2.068449 X3 - 0.737095 \text{ LOG}(X4)$$

1. Nilai konstant sebesar 422.8171 artinya tanpa adanya variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah maka variabel Kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 422.8171%.
2. Nilai koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 7.392855, jika nilai variabel lain konstan dan variabel PDRB mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7.392855%.
3. Nilai koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar -4.926119, jika nilai variabel lain konstant dan variabel IPM mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 4.926119%.
4. Nilai koefisien variabel Tingkat Pengangguran sebesar 2.068449, jika nilai variabel lain konstant dan variabel Tingkat Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 2.068449%.
5. Nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar -.0.737095, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel Pengeluaran Pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.737095%.

## **Pembahasan**

Penjelasan mengenai hasil uji hipotesis yang didapat dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

### **4.1.11 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan**

Hasil pengujian hipotesis pertama PDRB tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Penelitian ini menghasilkan bukti PDRB tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Apabila dilihat dari nilai koefisien PDRB ada pengaruh negatif karena jika PDRB mengalami peningkatan, maka Kemiskinan akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya. Jika Kemiskinan mengalami penurunan, maka PDRB akan mengalami peningkatan. Variabel PDRB terbukti berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2023. PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan karena peningkatan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sering kali disertai dengan peningkatan pendapatan per kapita dan penciptaan lapangan kerja, yang mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, pertumbuhan PDRB menarik lebih banyak investasi publik dan swasta, yang mendanai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Dengan PDRB yang lebih tinggi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk program kesejahteraan sosial, seperti subsidi pangan dan perumahan, yang membantu mengurangi kemiskinan. Efek multiplier dari peningkatan PDRB juga memperluas kesempatan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan, sementara pemberdayaan komunitas lokal melalui kewirausahaan dan peningkatan keterampilan kerja memberikan alat untuk mengatasi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hafiz, 2020) Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Malang. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di kota tersebut. Meskipun PDRB menunjukkan peningkatan dalam ukuran ekonomi secara keseluruhan, pertumbuhan

ini tidak tersebar secara merata di antara semua elemen masyarakat. Akibatnya, hanya segelintir kelompok yang menikmati manfaat dari peningkatan ekonomi, sementara sebagian besar masyarakat tetap berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi ini membuat peningkatan PDRB tidak mampu secara langsung mengurangi angka kemiskinan. Banyak masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Kondisi ini memperparah kesenjangan antara kelompok masyarakat yang lebih sejahtera dengan kelompok yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, meskipun PDRB merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja ekonomi suatu daerah, variabel ini tidak dapat dijadikan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan. Upaya yang lebih spesifik dan terarah diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok saja. Maka dari itu, kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Malang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Susanti dan Anindya, 2019), ditemukan bahwa meskipun terjadi peningkatan PDRB di beberapa daerah di Indonesia, hal tersebut tidak secara langsung berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor distribusi pendapatan memainkan peran penting dalam menentukan apakah peningkatan PDRB dapat mengurangi kemiskinan. Selain itu, penelitian oleh (Purwanto dan Widiastuti, 2020) juga mendukung temuan tersebut dengan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB tidak selalu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena adanya ketimpangan ekonomi yang masih tinggi.

#### **4.1.12 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan**

Hasil pengujian hipotesis pertama IPM signifikan negatif terhadap Kemiskinan. Penelitian ini menghasilkan bukti IPM signifikan terhadap Kemiskinan. Apabila dilihat dari nilai koefisien IPM ada pengaruh negatif karena jika IPM mengalami peningkatan, maka Kemiskinan akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya. Jika Kemiskinan mengalami penurunan, maka IPM akan mengalami peningkatan. Variabel IPM terbukti berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan karena peningkatan IPM mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dengan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, masyarakat menjadi lebih terampil dan berpendidikan, yang membuka peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Perbaikan dalam layanan kesehatan meningkatkan harapan hidup dan produktivitas, yang membantu mengurangi beban ekonomi pada keluarga miskin. Standar hidup yang lebih baik, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi, dan perumahan layak, langsung mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Secara keseluruhan, peningkatan IPM menciptakan kondisi yang kondusif untuk mengurangi kemiskinan, dengan meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi, mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Q'rene, dkk, 2023) Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan (TK). Berdasarkan teori yang ada, IPM seharusnya berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan, artinya semakin meningkat kualitas sumber daya manusia, maka semakin tinggi standar hidup masyarakat, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, IPM yang rendah akan meningkatkan kemiskinan karena kualitas hidup dan kemampuan ekonomi masyarakat juga rendah. Namun, dalam konteks tertentu, meskipun ada peningkatan pada IPM, pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan tidak selalu signifikan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti ketimpangan distribusi

pendapatan, akses yang tidak merata terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta kebijakan pemerintah yang kurang efektif dalam mengatasi akar permasalahan kemiskinan. Dengan kata lain, meskipun kualitas sumber daya manusia meningkat, tanpa didukung oleh faktor-faktor pendukung lainnya, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi tidak signifikan. Selain itu, faktor struktural dan kultural juga memainkan peran penting. Misalnya, adanya diskriminasi dalam pasar kerja, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, dan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dapat menghambat efek positif dari peningkatan IPM terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis IPM memiliki potensi untuk menurunkan kemiskinan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak variabel lain yang perlu diperhatikan untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati dan Susilo, 2018) menemukan bahwa meskipun IPM menunjukkan peningkatan, hal tersebut tidak secara langsung berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di beberapa wilayah di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa ada faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, seperti kebijakan ekonomi yang tidak merata dan akses terhadap sumber daya. Selain itu, studi oleh (Lestari dan Mahendra, 2019) juga mendukung temuan tersebut dengan menyatakan bahwa peningkatan IPM tidak signifikan dalam mengurangi kemiskinan karena adanya ketimpangan dalam distribusi pelayanan pendidikan dan kesehatan.

#### **4.1.13 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan**

Hasil pengujian hipotesis pertama Tingkat Pengangguran signifikan terhadap Kemiskinan. Penelitian ini menghasilkan bukti Tingkat Pengangguran signifikan terhadap Kemiskinan. Apabila dilihat dari nilai koefisien Tingkat Pengangguran ada pengaruh positif karena jika Tingkat Pengangguran mengalami peningkatan, maka Kemiskinan akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. Jika Kemiskinan mengalami penurunan, maka Tingkat Pengangguran akan mengalami penurunan. Variabel Tingkat Pengangguran terbukti berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2023. Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan karena semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak orang yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap, sehingga meningkatkan jumlah individu dan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pengangguran mengurangi daya beli masyarakat, yang membatasi akses mereka terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan layanan kesehatan. Tanpa pekerjaan, individu kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja, yang menghambat mobilitas sosial dan memperpanjang siklus kemiskinan. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran dapat membebani sistem jaminan sosial dan layanan pemerintah, mengurangi kemampuan negara untuk menyediakan bantuan yang memadai bagi yang membutuhkan. Ketika banyak orang menganggur, terjadi penurunan dalam konsumsi domestik, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih sedikit peluang kerja, sehingga memperburuk masalah kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ade, dkk, 2023) Menawarkan lebih banyak dan lebih luas lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran adalah proses yang memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan demikian, upaya utama dalam mengatasi kemiskinan perlu difokuskan pada pengembangan ketenagakerjaan. Orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk dalam kategori pendapatan menengah atau tinggi. Namun, Pernyataan ini tidak menunjukkan bahwa setiap orang yang tidak bekerja hidup dalam kemiskinan, atau bahwa mereka yang bekerja penuh waktu selalu memiliki penghasilan yang memadai. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang luas, dan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Banyak dari mereka yang bekerja paruh waktu (*part-time*) sering kali tidak memiliki akses ke manfaat dan upah yang layak, yang menyebabkan mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan yang efektif harus mencakup peningkatan kualitas pekerjaan *part-time* dan memastikan bahwa pekerjaan penuh waktu juga memberikan upah yang layak. Strategi yang holistik dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan merata di berbagai sektor ekonomi adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan. Ini mencakup kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor swasta, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan,

serta peningkatan akses ke fasilitas kesehatan dan perumahan yang terjangkau. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, masalah pengangguran dan kemiskinan dapat diatasi secara efektif. Penelitian oleh (Suryadarma dan Suryahadi, 2018) menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi secara langsung meningkatkan jumlah penduduk miskin karena mereka kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Selain itu, penelitian oleh (Yusuf dan Resosudarmo, 2019) juga mendukung temuan tersebut dengan menyatakan bahwa pengangguran berkontribusi signifikan terhadap kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan, dengan dampak yang lebih besar di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan kerja.

#### **4.1.14 Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan**

Hasil pengujian hipotesis pertama Belanja Pemerintah signifikan negatif terhadap Kemiskinan. Penelitian ini menghasilkan bukti Belanja Pemerintah signifikan terhadap Kemiskinan. Apabila dilihat dari nilai koefisien Belanja Pemerintah ada pengaruh negatif karena jika Belanja Pemerintah mengalami peningkatan, maka Kemiskinan akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya. Jika Kemiskinan mengalami penurunan, maka Belanja Pemerintah akan mengalami peningkatan. Variabel Belanja Pemerintah terbukti berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2023. Belanja pemerintah dapat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan jika pengeluaran tersebut tidak efektif atau tidak tepat sasaran. Ketika dana pemerintah disalurkan ke proyek-proyek yang tidak produktif atau mengalami kebocoran karena korupsi, manfaat yang diharapkan untuk mengurangi kemiskinan tidak tercapai. Misalokasi dana, seperti pembiayaan infrastruktur yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin atau proyek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, dapat meningkatkan ketidaksetaraan dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, jika belanja pemerintah berfokus pada program-program yang tidak memberikan dampak jangka panjang, seperti subsidi yang tidak berkelanjutan atau bantuan tunai yang tidak disertai dengan

program pemberdayaan, masyarakat miskin tetap bergantung pada bantuan tanpa peningkatan kemandirian ekonomi. Penambahan beban fiskal karena belanja yang tidak efisien juga dapat menyebabkan defisit anggaran, yang memaksa pemerintah untuk meningkatkan pajak atau memotong program-program penting lainnya, yang akhirnya merugikan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah yang tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk kemiskinan alih-alih menguranginya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sigalingging, Stefani Theresia M, 2023) Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan pengeluaran pemerintah justru dapat menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti efektivitas dan efisiensi pengeluaran yang rendah, di mana anggaran tidak tepat sasaran atau terjadi korupsi, serta inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan pengeluaran tanpa peningkatan produksi barang dan jasa yang memadai. Selain itu, program bantuan pemerintah yang tidak disertai upaya pemberdayaan bisa menciptakan ketergantungan, mengurangi inisiatif masyarakat untuk mandiri, dan distribusi anggaran yang tidak merata, sehingga hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dan tidak mencapai kelompok yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, meskipun pengeluaran pemerintah seharusnya berfungsi untuk mengurangi kemiskinan, tanpa manajemen yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, pengeluaran ini justru dapat memperburuk kondisi kemiskina. Penelitian oleh (Prasetyo dan Firdaus, 2017) menemukan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Mereka menjelaskan bahwa dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat. Selain itu, studi oleh (Haryanto dan Setiawan, 2018) juga mendukung temuan tersebut dengan menyatakan bahwa belanja pemerintah pada infrastruktur dan program-program sosial dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan dengan memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan dasar dan meningkatkan perekonomian lokal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa model estimasi regresi yang digunakan adalah *fixed effect model*. Variabel independen yang terdiri dari Pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023.
2. Berdasarkan temuan penelitian, variabel Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2023 memiliki korelasi positif dan tidak signifikan terhadap PDRB dari tahun 2012 hingga 2023. Ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB secara nyata akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.
3. Berdasarkan temuan penelitian, ada korelasi negatif dan signifikan antara variabel Kemiskinan dengan IPM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2023. Ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara nyata akan menyebabkan penurunan kemiskinan.
4. Menurut temuan penelitian, variabel Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2023 memiliki korelasi positif dan signifikan dengan Tingkat Pengangguran dari tahun 2012 hingga 2023. Ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran memiliki efek positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
5. Menurut temuan penelitian, variabel Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2023 memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan Belanja Pemerintah dari tahun 2012

hingga 2023. Ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Belanja Pemerintah memiliki efek negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, implikasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB tidak selalu tercermin dalam penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Meskipun PDRB dapat meningkat sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu daerah, manfaat dari pertumbuhan tersebut sering kali tidak merata dan tidak sampai kepada mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan. Faktor-faktor seperti ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi, ketidakmampuan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, serta struktur sosial-ekonomi yang tidak inklusif, semuanya dapat menghalangi dampak positif PDRB terhadap penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, perlu ada upaya yang lebih terfokus dan komprehensif dalam mendistribusikan manfaat dari pertumbuhan ekonomi agar mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan terhadap kemiskinan.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak selalu berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan adalah karena IPM fokus pada indikator-indikator seperti harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang lebih luas, namun tidak secara langsung menangani akar permasalahan kemiskinan yang kompleks. Meskipun peningkatan IPM dapat menunjukkan kemajuan dalam kualitas hidup manusia secara umum, hal itu tidak selalu mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang signifikan. Faktor-faktor lain seperti ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kesenjangan akses terhadap lapangan

kerja yang layak, dan masalah struktural ekonomi yang tidak merata juga berkontribusi terhadap ketidakmampuan IPM dalam mengurangi kemiskinan secara efektif. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan dengan lebih efektif, perlu ada pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan kebijakan yang mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial secara langsung, serta memastikan bahwa manfaat dari peningkatan IPM benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan terhadap kemiskinan.

3. Tingkat pengangguran memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena secara langsung mempengaruhi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Ketika tingkat pengangguran tinggi, banyak individu menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang cukup, yang dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Selain itu, pengangguran yang tinggi juga dapat menciptakan tekanan ekonomi dan sosial yang lebih luas dalam masyarakat, seperti penurunan daya beli dan meningkatnya ketegangan sosial. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja berkualitas, investasi dalam pelatihan keterampilan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan akses terhadap kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Pendekatan holistik ini penting untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang setara dalam meningkatkan kondisi ekonomi mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan secara efektif.
4. Belanja pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan adalah karena pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran krusial dalam mengurangi atau bahkan meningkatkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara atau wilayah. Jika belanja pemerintah diarahkan dengan efektif untuk meningkatkan infrastruktur sosial, layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, hal ini dapat secara langsung memperbaiki kondisi hidup masyarakat yang kurang mampu dan

rentan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, jika alokasi anggaran tidak tepat atau terjadi penyalahgunaan dana, pengaruhnya bisa berdampak negatif dengan meningkatkan ketimpangan ekonomi dan sosial serta memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola belanja publik dengan baik, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan, sehingga dapat berkontribusi secara efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Christianto, H. (2013). Kemiskinan, Kesenjangan, dan Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 183-196.
- Fadlillah, Nurul, Sukiman, dan Dewi, Agustin Susyatna. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, Ipm Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *EkoRegional*, Vol.11, No.1, hal. 18-26.
- Groce, Nora. (2011). "Disability and the MDGs: The Missing Link?" *\*The Lancet\**, vol. 377, no. 9781, pp. 564-566.
- Haryanto, T., & Setiawan, B. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah pada Infrastruktur dan Program Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 13(2), 101-115.
- Jhingan, M.L. (2000). *\*The Economics of Development and Planning\**. Vrinda Publications.
- Lestari, D., & Mahendra, A. (2019). "Analisis Ketimpangan dalam Pembangunan Manusia dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Daerah*, 14(2), 98-112.
- Lumbantoruan. Pratiwi, E. & Hidayat, P. (2014). "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia". (Metode Kointegrasi). *Ekonomi Dan Keuangan*. Universitas Sumatera Utara, Vol.2, No.2. Medan.
- Mankiw, N. G. (2000). *Principles of Economics*. New York: Harcourt College Publishers.
- Mikesell, J. L. (2013). *Fiscal Administration*. Cengage Learning.
- Nurhadi. (2007). *Mengembangkan Jaminan Sosial dan Mengentaskan Kemiskinan*. Cetakan pertama, Yogyakarta: Media Wacana.

- Prasetyo, W., & Firdaus, M. (2017). Dampak Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 33-47.
- Purwanto, D., & Widiastuti, E. (2020). "Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Daerah Urban: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 18(1), 34-50.
- Rahmawati, A., & Susilo, H. (2018). "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 17(3), 211-225.
- Rahmawati, Kurnia Dwi. (2017). Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di DIY Periode 2006-2013.
- Ravi Dwi Wijayanto. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rustam. (2010). \*Pembangunan Ekonomi Indonesia\*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sanusi, Dewi Kurniawati, Anderson Kumenaung dan, Debby Rotinsulu. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 14, No.2.Hal:120-137
- Sartika, A. (2016). \*Pembangunan dan Kemiskinan di Negara-negara Berkembang\*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Setiawati, Irma. (2017). "Pengaruh produk domestik regional bruto, pendidikan dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinang". IESP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Alaudin, Makasar.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2007. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.
- Siregar, Hermanto. & Wahyuniarti, Dwi. (2008). "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin".
- Sitepu, K Rasidin, dan Bonar M, Sinaga. (2004). "Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Indonesia": Pendekatan Model.

- Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Ekosiana, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. (2009). "Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia", Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan. (2000). *Memahami Kemiskinan: Pengantar untuk Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno. (1994). *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2018). "Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Empiris." *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 23(1), 45-60.
- Susanti, R., & Anindya, P. (2019). "Hubungan PDRB dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 145-158.
- UNCHS. (1996). *Habitat Agenda: Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action*. United Nations Centre for Human Settlements.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonesia.
- World Bank Institute. (2002). *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. Edisi Terjemahan. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- World Bank. (2015). *Global Financial development report 2015-2016: Long-term finance*. Washington, DC: World Bank.
- Yacoub, Y. (2012). *Evaluating Economic Development Performance: An Analytical Study with Reference to Middle East and North Africa (MENA) Countries*. *International Journal of Business and Social Science*, 3(21), 240-249.
- Yulianita. (2009). *\*Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan\**. Rajawali Pers.
- Yusuf, A. A., & Resosudarmo, B. P. (2019). "Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Perkotaan dan Pedesaan." *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 12(2), 121-135.

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Data Penelitian

No	Kabupaten	Tahun	ID	Y	X1	X2	X3	X4
1	Kulonprogo	2012	1	92.4	6143.11	69.74	3.04	448020212729.00
2	Kulonprogo	2013	1	86.6	6073.72	70.14	2.86	356364550940806.00
3	Kulonprogo	2014	1	84.7	6004.32	70.08	2.88	468786721148.00
4	Kulonprogo	2015	1	88.13	6281.90	71.52	3.72	38112738394.00
5	Kulonprogo	2016	1	84.34	6580.68	72.38	2.855	517662242112.00
6	Kulonprogo	2017	1	84.17	6973.41	73.23	1.99	475555964731.95
7	Kulonprogo	2018	1	77.72	7728.41	73.76	1.49	498321020434.00
8	Kulonprogo	2019	1	74.62	8770.75	74.44	1.8	491377756435.16
9	Kulonprogo	2020	1	78.06	8468.29	74.46	3.71	384909074679.28
10	Kulonprogo	2021	1	81.14	8838.14	74.71	3.69	137435450918.00
11	Kulonprogo	2022	1	73.21	9419.36	75.46	2.8	332757994213.00
12	Kulonprogo	2023	1	70.74	9951.95	75.82	2.4	235096722565.50
13	Bantul	2012	2	158.8	12401.54	76.13	3.7	671995822859871.00
14	Bantul	2013	2	156.6	13626.33	76.78	3.36	535855839823.49
15	Bantul	2014	2	153.5	14851.12	77.11	2.57	782585998347.00
16	Bantul	2015	2	160.2	15588.52	77.99	3	52567417001.00
17	Bantul	2016	2	142.8	16375.51	78.42	3.06	796358850109.00
18	Bantul	2017	2	139.7	17209.87	78.67	3.12	728531954257.22
19	Bantul	2018	2	134.8	18150.88	79.45	2.72	737207763600.00
20	Bantul	2019	2	131.2	19155.27	80.01	3.06	750896556073.23
21	Bantul	2020	2	138.7	18839.37	80.01	4.06	581043536214.00
22	Bantul	2021	2	147	19781.89	80.28	4.04	118911477472.00
23	Bantul	2022	2	130.1	20809.22	80.69	3.97	479304037627.00
24	Bantul	2023	2	128.5	21861.77	81.74	3.78	299107757549.50
25	Gungungkidul	2012	3	156.5	16250.78	65.69	1.38	603757481296.00
26	Gungungkidul	2013	3	152.4	13445.29	66.31	1.69	495231503123.52
27	Gungungkidul	2014	3	148.4	10639.79	67.03	1.61	280014655033.76
28	Gungungkidul	2015	3	155	11152.36	67.41	2.9	64797806944.00
29	Gungungkidul	2016	3	139.2	11696.16	67.82	2.275	30345348862.00
30	Gungungkidul	2017	3	135.7	12281.56	68.73	1.65	682833488498.57
31	Gungungkidul	2018	3	125.8	12914.94	69.24	2.07	660983622312.49
32	Gungungkidul	2019	3	123.1	13605.07	69.96	1.92	722704491505.00
33	Gungungkidul	2020	3	127.6	13512.44	69.98	2.16	557227618707.00
34	Gungungkidul	2021	3	135.3	14230.14	70.16	2.2	122916719208.00

35	Gunggungkidul	2022	3	122.8	14994.23	70.96	2.08	528690495960.00
36	Gunggungkidul	2023	3	122.5	15749.22	71.46	2.09	325803607584.00
37	Seleman	2012	4	116.8	21231.15	80.1	5.64	721680128633.82
38	Seleman	2013	4	110.1	23972.11	80.26	3.28	495231503123.52
39	Seleman	2014	4	110.4	<b>26713.07</b>	80.73	4.21	278747328761.26
40	Seleman	2015	4	111	<b>28098.01</b>	81.2	5.37	62263154399.00
41	Seleman	2016	4	96.63	<b>29563.38</b>	82.15	4.44	782647963673.00
42	Seleman	2017	4	96.75	<b>31140.59</b>	82.85	3.51	1986846822.00
43	Seleman	2018	4	92.04	<b>33138.26</b>	83.42	4.4	868384269783.60
44	Seleman	2019	4	90.17	35286.51	83.85	3.93	760045051452.03
45	Seleman	2020	4	99.78	33857.33	83.84	5.09	587864548721.20
46	Seleman	2021	4	108.9	35755.93	84	5.17	153070038319.59
47	Seleman	2022	4	98.92	37596.42	84.31	4.78	516252827454.00
48	Seleman	2023	4	97.5	39508.68	84.86	4.47	143566743452081.00
49	Kota.Yogyakarta	2012	5	37.6	30408.22	83.29	5.33	286617234076709.00
50	Kota.Yogyakarta	2013	5	35.6	25857.99	83.61	6.45	369371050318164.00
51	Kota.Yogyakarta	2014	5	35.6	<b>21307.76</b>	83.78	6.35	184703140205292.00
52	Kota.Yogyakarta	2015	5	35.98	<b>22393.01</b>	84.56	5.52	35230092421.00
53	Kota.Yogyakarta	2016	5	32.06	<b>23536.29</b>	85.32	5.3	782647963673.00
54	Kota.Yogyakarta	2017	5	32.2	<b>24768.43</b>	85.49	5.08	496692083255.41
55	Kota.Yogyakarta	2018	5	29.75	<b>26127.22</b>	86.11	6.22	429763867001.91
56	Kota.Yogyakarta	2019	5	29.45	27685.29	86.65	4.8	418586418734.47
57	Kota.Yogyakarta	2020	5	31.62	27016.50	86.61	9.16	293069120954.00
58	Kota.Yogyakarta	2021	5	34.07	27409.76	87.18	9.13	163043522146.00
59	Kota.Yogyakarta	2022	5	29.68	29863.00	87.69	7.18	232176680146.00
60	Kota.Yogyakarta	2023	5	29.48	31378.80	88.61	6.07	197610101146.00

## Lampiran II. Uji *Common Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 09/10/24 Time: 12:16

Sample: 2012 2023

Periods included: 12

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.95452	93.69735	0.437094	0.6638
LOG(X1)	46.35429	11.48515	4.036020	0.0002
X2	-4.175753	1.286381	-3.246124	0.0020
X3	-11.66120	3.715231	-3.138754	0.0027
LOG(X4)	-0.866830	1.582305	-0.547827	0.5860
Root MSE	27.04297	R-squared		0.571380
Mean dependent var	99.39967	Adjusted R-squared		0.540207
S.D. dependent var	41.65504	S.E. of regression		28.24546
Akaike info criterion	9.599398	Sum squared resid		43879.32
Schwarz criterion	9.773926	Log likelihood		-282.9819
Hannan-Quinn criter.	9.667665	F-statistic		18.32967
Durbin-Watson stat	0.326444	Prob(F-statistic)		0.000000

### Lampiran III. Uji *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 09/10/24 Time: 12:18

Sample: 2012 2023

Periods included: 12

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	422.8171	45.78810	9.234213	0.0000
LOG(X1)	7.392855	7.704298	0.959575	0.3418
X2	-4.926119	0.717229	-6.868265	0.0000
X3	2.068449	0.881020	2.347789	0.0228
LOG(X4)	-0.737095	0.332228	-2.218645	0.0310

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	4.998401	R-squared	0.985357
Mean dependent var	99.39967	Adjusted R-squared	0.983060
S.D. dependent var	41.65504	S.E. of regression	5.421528
Akaike info criterion	6.356113	Sum squared resid	1499.041
Schwarz criterion	6.670265	Log likelihood	-181.6834
Hannan-Quinn criter.	6.478995	F-statistic	428.9903
Durbin-Watson stat	1.128719	Prob(F-statistic)	0.000000

#### Lampiran IV. Uji *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 09/10/24 Time: 12:20

Sample: 2012 2023

Periods included: 12

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 60

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.95452	17.98458	2.277201	0.0267
LOG(X1)	46.35429	2.204498	21.02714	0.0000
X2	-4.175753	0.246912	-16.91189	0.0000
X3	-11.66120	0.713114	-16.35250	0.0000
LOG(X4)	-0.866830	0.303713	-2.854109	0.0061

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		5.421528	1.0000

Weighted Statistics			
Root MSE	27.04297	R-squared	0.571380
Mean dependent var	99.39967	Adjusted R-squared	0.540207
S.D. dependent var	41.65504	S.E. of regression	28.24546
Sum squared resid	43879.32	F-statistic	18.32967
Durbin-Watson stat	0.326444	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics			
R-squared	0.571380	Mean dependent var	99.39967
Sum squared resid	43879.32	Durbin-Watson stat	0.326444

### Lampiran V. Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FIXED

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	360.462807	(4,51)	0.0000
Cross-section Chi-square	202.597051	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 09/10/24 Time: 12:22

Sample: 2012 2023

Periods included: 12

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.95452	93.69735	0.437094	0.6638
LOG(X1)	46.35429	11.48515	4.036020	0.0002
X2	-4.175753	1.286381	-3.246124	0.0020
X3	-11.66120	3.715231	-3.138754	0.0027
LOG(X4)	-0.866830	1.582305	-0.547827	0.5860
Root MSE	27.04297	R-squared		0.571380
Mean dependent var	99.39967	Adjusted R-squared		0.540207
S.D. dependent var	41.65504	S.E. of regression		28.24546
Akaike info criterion	9.599398	Sum squared resid		43879.32
Schwarz criterion	9.773926	Log likelihood		-282.9819
Hannan-Quinn criter.	9.667665	F-statistic		18.32967
Durbin-Watson stat	0.326444	Prob(F-statistic)		0.000000

## Lampiran VI. Uji LM Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	167.6466 (0.0000)	0.823605 (0.3641)	168.4702 (0.0000)
Honda	12.94784 (0.0000)	-0.907527 (0.8179)	8.513789 (0.0000)
King-Wu	12.94784 (0.0000)	-0.907527 (0.8179)	10.61923 (0.0000)
Standardized Honda	22.92605 (0.0000)	-0.725290 (0.7659)	7.958683 (0.0000)
Standardized King-Wu	22.92605 (0.0000)	-0.725290 (0.7659)	12.48305 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	167.6466 (0.0000)

## Lampiran VII. Uji *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1441.851227	4	0.0000

\*\* WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1)	7.392855	46.354293	54.496392	0.0000
X2	-4.926119	-4.175753	0.453452	0.2651
X3	2.068449	-11.661198	0.267665	0.0000
LOG(X4)	-0.737095	-0.866830	0.018134	0.3353

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 09/10/24 Time: 12:24

Sample: 2012 2023

Periods included: 12

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	422.8171	45.78810	9.234213	0.0000
LOG(X1)	7.392855	7.704298	0.959575	0.3418
X2	-4.926119	0.717229	-6.868265	0.0000
X3	2.068449	0.881020	2.347789	0.0228
LOG(X4)	-0.737095	0.332228	-2.218645	0.0310

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	4.998401	R-squared	0.985357
Mean dependent var	99.39967	Adjusted R-squared	0.983060
S.D. dependent var	41.65504	S.E. of regression	5.421528
Akaike info criterion	6.356113	Sum squared resid	1499.041

Schwarz criterion	6.670265	Log likelihood	-181.6834
Hannan-Quinn criter.	6.478995	F-statistic	428.9903
Durbin-Watson stat	1.128719	Prob(F-statistic)	0.000000

---

---